##### BAB. I

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

**K**

 esejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, sipiritual dan sosial warga Negara, agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial nya. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. (UU No II Thn 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial).

Pekerjaan Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial , dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

 **T**

erwujudnya suatu Tata Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak. Upaya untuk mewujudkan *good governance* tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Good Governance yang dicita-citakan berikut pilar-pilarnya seperti transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dapat digambarkan sebagai berikut ;

**GOOD GOVERNANCE**

**T**

**R**

**A**

**N**

**S**

**P**

**A**

**R**

**A**

**N**

**S**

**I**

**A**

**K**

**U**

**N**

**T**

**A**

**B**

**I**

**L**

**I**

**T**

**A**

**S**

**P**

**A**

**R**

**T**

**I**

**S**

**I**

**P**

**A**

**S**

**I**

**PEMERINTAH - MASYARAKAT - DUNIA USAHA**

**S**

elain itu LKjIP ini juga merupakan akhir dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama Tahun 2019. Penyusunan LKjIP menggunakan pendekatan sesuai Surat Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

* 1. **Dasar Hukum**

**P**

enyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2019 mengacu pada :

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Permenpan dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2004, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.
12. Perda Provinsi Kepri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri Tahun 2010-2015
13. Perda Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2017
14. Perda Kota Batam Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2016 No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam No. 108);
15. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 472);
16. Peraturan Walikota Batam Nomor, 45 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat;
	1. **Gambaran Umum Organisasi**

**1.3.1. Kedudukan**

**S**

esuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Batam dan Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 472);

Kota Batam mempertegas Peran dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Batam di Era Otonomi Daerah.

**1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

**a. TUGAS POKOK**

#####  D

##### inas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam mempunyai Tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas Otonomi dan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

* 1. **F U N G S I**

##### U

##### ntuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang Penanganan Fakir Miskin, Bidang Rehabilitasi sosial, Bidang Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
6. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;
8. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

**1.3.3. Susunan Organisasi dan Personil**

 **K**

epala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang, yaitu :

* 1. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
	2. Bidang Rehabilitasi Sosial;
	3. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial;
	4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

Jumlah personil yang ada :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jabatan** | **Jumlah** |
| 1. |  | Kepala Dinas | 1 | Orang |
| 2. |  | Sekretaris | 1 | Orang |
| 3. |  | Kepala Bidang; |  | Orang |
|  |  | a. Bidang Penanganan Fakir Miskin | 1 | Orang |
|  |  | b. Bidang Rehabilitasi Sosial | 1 | Orang |
|  |  | c. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial | 1 | Orang |
|  |  | d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 1 | Orang |
| 4. |  | Kepala Sub Bag | 3 | Orang |
| 5. |  | Kepala Seksi | 12 | Orang |
| 6. |  | Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) | 1 | Orang |
|  |  | * Kepala Sub.Tata Usaha
 | 1 | Orang |
| 7. |  | Staf / Pelaksana |  |  |
|  |  | Staf Gol. IV | - | Orang |
|  |  | Staf Gol. III | 12 | Orang |
|   |  | Staf Gol. II |  6 | Orang |
|   |  | THD/Honor | 19 | Orang |
|   |  |  | ***JUMLAH*** | ***60*** | ***Orang*** |

* 1. **. Aspek Strategik yang Berpengaruh**

 **B**

eberapa aspek utama yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam antara lain:

* + 1. Mendesaknya pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data PMKS, program dan kegiatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang perkembangan dan penyebaran populasinya semakin meningkat, beragam, luas dan kompleks.
		2. Taraf Kesejahteraan Sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara layak dan normatif masih rendah perlu ditingkatkan kearah yang lebih baik, sehingga kualitas pemenuhan terhadap kebutuhan dasarnya dapat tercapai.
		3. Kualitas dan Kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Sasaran Garapan atau Dunia usaha Lainnya yang tersedia masih perlu adanya peningkatan partisipasi, pemberdayaan dan pengembangan dalam melaksanakan Pelayanan sosial.
		4. Kualitas dan Kuantitas Kelembagaan yang ada di Kelurahan meskipun sudah banyak yang berpartisipatif aktif, tetap perlu dorongan juga pemberdayaan yang lebih baik sehingga akan mewujudkan kemandirian dari masing-masing kelembagaan yang ada di Kelurahan untuk Pembangunan di Kota Batam.
	1. **. Sistematika Penyajian**

**S**

ubstansi yang tercakup dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) OPD Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**RINGKASAN EKSEKUTIF**, menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja sasaran, kendala dan hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah.

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, gambaran umum organisasi dan sekilas pengantar lainnya.

**BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja.

 **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

 Bab ini menguraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan menggunakan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

 **BAB IV PENUTUP**

Lampiran-lampiran

BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### Rencana Strategik

**P**

erencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Ukuran Keberhasilan dalam pelaksanaannya.

 Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan Strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan Strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam memberikan pedoman dalam melaksanakan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

Rencana Strategik Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2016 - 2021 mencakup komponen–komponen Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta cara mencapainya (Kebijakan dan Program) Sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2019 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019.

* + 1. **Visi dan Misi**

**V**

isi dan Misi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Tahun 2016 - 2021 telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| **VISI*****Terwujudnya Pelayanan Sosial Yang Prima dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial***  | **MISI** |
| **1****2****3** | ***Meningkatkan Kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan, Jaminan dan pemberdayaan sosial dan juga Pemberdayaan Masyarakat;******Mengembangkan prakarsa dan megoptimalkan peran aktif masyarakat dalam pendayagunaan PSKS berbasis nilai-nilai Kepahlawanan, keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;******Meningkatkan dan Mengembangkan kapasitas keberdayaan lembaga Kemasyarakatan.*** |

* + 1. **Tujuan dan Sasaran**

**T**

ujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

**S**

asaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategik .

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam pada Tahun 2016 -2021 berdasarkan misi yang telah di rumuskan adalah sebagai berikut :

* **Misi 1 : Meningkatkan Kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), *melalui Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial dan juga Pemberdayaan Masyarakat*;**

Sasaran - sasaran strategik dari tujuan tersebut, yaitu :

Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Pemberdayaan Masyarakat.

* **Misi 2 : *Mengembangkan prakarsa dan megoptimalkan peran aktif masyarakat dalam pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berbasis nilai-nilai Kepahlawanan, keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;***

 Sasaran-sasaran strategik dari tujuan tersebut, yaitu :

Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS/Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) Partisipasinya dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Batam.

* **Misi 3 : *Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.***

 Sasaran – sasaran strategik dari tujuan tersebut, yaitu :

Meningkatnya partisipasi kelembagaan yang ada di Masyarakat dalam upaya peningkatan pemberdayaan dan kemandirian dalam pembangunan di Kota Batam.

**2.1.3** **Kebijakan dan Program**

**K**

 ebijaksanaan dan program merupakan strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

### 2.2 Perjanjian Kinerja,

**P**

erjanjian kinerja adalah janji SKPD yang akan dicapai selama satu tahun selama tahun 2019 yang merupakan penjabaran pencapai sasaran RPJMD dan RENSTRA SKPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat asumsi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) s.d Oktober 2019, berjumlah 54.228 KPM. (208.557 Jiwa), dengan Kuota Bantuan Pangan 2019 yaitu : 26.051 dan Program *PKH. 19.658* KPM. Khusus untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam penanganan yaitu :

1. Urusan Sosial, melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2019 target sebanyak: 3.457 Org/Jiwa, tetapi di dalam DPA pada Tahun 2019 target hanya 2.819 Org/Jiwa;
2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2019 target sebanyak 565 Lembaga ( 4.525 Orang ) terdiri dari :
* Posyandu dan Kader Desa Siaga : 565 Lembaga;
* Peserta Teknologi Tepat Guna (TTG) : 35 Peserta/Tim;
* Bulan Bhakti Gotong-Royong Masyarkat(BBGRM) : 400 Orang,

TMMD : 355 Orang,

Didalam DPA Tahun 2019 di targetkan 594 Lembaga (4.133 Org),

LAMPIRAN : II. 2.2.1

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA**  | **TARGET** | **PROGRAM/KEGIATAN** | **REALISASI****FISIK** | **ANGGARAN** |
| 1 | 2 |  |  | 4 |  | 5 |
| **Peningkatan Kualitas Hidup Sosial Kemasyarakatan** | 1. Menurunya Jumlah PMKS
 | **45%**(37,428)16,246 | **Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial:** |  | **7,015,268,631** |
|  |  | 12 (37.428) | 1 | Verivikasi dan Validasi data PMKS | 12(55.669) | 312,776,500 |
|  |  | - |  2 | Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Wilayah Perkotaan | - | - |
|  |  | 60 |  3 | Bantuan Rehabilitasi Rmah Tidak Layak Huni Wiayah Pesisir dan Perbatasan | 55 Unit | 1,623,400,000 |
|  | 1. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS
 | 25 lbg (25Org) |  4 | Bimbingan Terhadap Organisasi Sosial / Orsos (TKSK,KT,LK3S dll) | 25 Lbg | 249,440,000 |
|  | 1. Jumlah PMKS yang mendapatkan Perlindungan, Jaminan dan pemberdayaan Sosial
 | 1500Jiwa/Org |  5 | Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Korban Bencana | 840 Jiwa/Org | 796,705,000 |
|  |  | 65 Jiwa/Org |  6 | Bantuan Pemulangan Orang Terlantar dan Penanganan Tindak Kekerasan | 51 Org | 94,930,000 |
|  |  | 20 Jiwa/Org |  7 | Pemakaman bagi Tunawan (Mr./Mrs. X) | 17 Org | 78,125,000 |
|  |  | 112 Org(21.574 KPM) |  8 | Penguatan Program Keluarga Harapan (PHK) Kota Batam (10,614 KPM) | 112 Org(21.574 KPM) | 1,265,654,000 |
|  | 1. Persentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial
 | 40 Jiwa/Org |  9 | Bimbingan dan Keterampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 40 Org | 493,826,100 |
|  |  | 345Jiwa/Org |  10  | Pengendalian dan Pengawasan PMKS | 333 Org | 207,910,000 |
|  |  | 30 ODGJ, 150 Org, 10 UEP |  **11** | Pelayanan Sosial Penyandang Disalibitas | 30 ODGJ, 150 Org, 10 UEP | 179,090,000 |
|  |  | 100 Anjal, 350 Lansia |  **12**  | Pelayanan Sosial bagi anak dan lanjut usia | 100 Anjal, 350 Lansia | 246,270,000 |
|  | **Target**  | **2,819** |  | **Realisasi** | **2.109** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Peningkatan Kualitas Hidup Sosial Kemasyarakatan** |  |  | **Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat** |  | **10,486,531,000** |
|  | 1. Jumlah Kapasitas Lembaga /Organisasi Masyarakat yang dapat diberdayakan,564
 | 530 Lbg. 64 KDS |  **13** | Pembinaan Lembaga dan Organisasi masyarakat | 501 Lbg. 64 KDS | 9,801,765,000 |
|  | 1. Persentase Swadaya Masyarakat
 | 33 .Lbg/tim  |  **14** | Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat | 27 Tim/Org | 245,880,000 |
|  | 1. Jumlah Kapasitas Lembaga dan Ekonomi Kelurahan
 | 12 Pst/Tim 365 BBGRM. |  **15** | Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kota Batam | 5 Pst/Tim - BBGRM. | 165,726,000 |
|  |  | 250 Org. 65 Lbg. |  **16** | Pendampingan Tentara Manunggal Membangun desa (TMMD) | 250 Org. 65 Lbg. | 273,160,000 |
|  | **Target** | 594 Lbg,3.838 Org 295 Org |  |  | 565 Lbg, 3.635 Org 282 Org. |  |
|  | **Jumlah target I + II** | 594 Lbg. 4.133 Org |  |  | 565 Lbg. 3.917 Org |  |
|  | Capaian Target sasaran ini di capai melalui Kegiatan yang bersumber dari APBD II, APBD I, dan APBN |

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

1. **Kerangka Pengukuran Kinerja**

**M**

engacu pada Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya, pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja.

**K**

emudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Kota Batam dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan penggunaan makna dari nilai yang diperoleh sebagai berikut :

 **SKALA PENILAIAN :**

|  |  |
| --- | --- |
| **SKALA NILAI** | **KATEGORI PENILAIAN** |
|  **85 s/d 100**  | **Sangat Berhasil** |
| **70 s/d** < **85** | **Berhasil** |
| **55 s/d** < **70** | **Cukup Berhasil** |
|  **0 s/d < 55** | **Kurang Berhasil** |

**Indikator Sasaran**

Indikator sasaran adalah sesuatu yang menunjukan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian sasaran.

***Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus* :**

**Persentase pencapaian Realisasi**

**Rencana tingkat capaian = x 100 %**

 **Rencana**

 Realisasi

Persentase pencapaian

Rencana tingkat capaian = x 100 %

 Rencana

***Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :***

**Persentase pencapaian Rencana – (Realisasi-Rencana)**

**Rencana tingkat capaian = x 100 %**

 **Rencana**

* 1. **Pengukuran Kinerja**

**B**

erdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2019, secara umum Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang direncanakan.

1). Pengukuran Kinerja Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam pada tahun 2019 dengan Target sesuai dengan RPJMD Perubahan yaitu; Urusan Sosial Target di dalam PK 3.457, di dalam DPA yaitu :

1. Penanganan PMKS Target 2.819 Org/Jiwa, realisasi 2.109 Org : 74,81 %

Urusan pemberdayan Masyarakat yaitu :

1. Target 594 Lembaga terealisasi 565 Lbg (3.635 Org) : 95, 12 %
2. Target 295 terealisasi 282 Orang : 95,60 %

Tetapi jika kegiatan di akumulasikan dari kedua urusan menjadi :

 - Urusan Sosial rata-rata : 87,35 %.

- Urusan Pemberdayaan Masyarakat rata-rata : 81,00 %

2). Pengukuran Pencapaian Sasaran

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2019, secara umum Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam telah berhasil mencapai sasaran strategis yang direncanakan. dalam RPJM tahun 2019, bahwa presentase pencapaian rencana tingkat capaian sebesar yaitu ;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Urusan Sosial :2.109 Org/KPM X 100 % = 74,81 %2.819 Org/KPM |  | Urusan Pemberdayaan Msyarakat:565 Org X 100 % = 95,12 %594 Org. |

Uraian sasaran di maksud adalah :

1. Peningkatan Kualitas hidup Sosial Kemasyarakatan yang terdiri dari :
* Menurunya Jumlah PMKS di Kota Batam, tercapai 93,05 %;
* Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS., Tercapai : 97,06 %;
* Jumlah PMKS yang mendapatkan Perlindungan, Jaminan dan pemberdayaan Sosial, tercapai 67,70 %;
* Persentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial, tercapai 90,87 %;
* Jumlah Kapasitas Lembaga /Org. Masyarakat yang dapat diberdayakan, tercapai 98,82 %;
* Persentase Swadaya Masyarakat tercapai, 89,76 %;
* Jumlah Kapasitas Lembaga dan Ekonomi Kelurahan, tercapai 39,48 %.
	1. **Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam tahun 2019 yang mendukung tercapainya visi dan misi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dapat disimpulkan pencapaian sasaran sebagai berikut:

**Sasaran 1** **:**

 **Peningkatan Kualitas Hidup Sosial Kemasyarakatan**

**Tahun 2019.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR** | **SATUAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN (%)** |
|  |  |  |  |  |
| 1. Menurunya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 | **%** |  72 |  67 | 93,05 |
| 1. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam Penanganan PMKS
 | % | 60 %(150)25 | 25 | 100  |
| 1. Jumlah PMKS yang mendapatkan Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial
 | KPM | 1.697 | 1.020 | 60,12 |
| 1. Persentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi
 | % | 15 %(8,197)1.025 | -997 | 97,27 |
| **Jumlah Program Penanganan PMKS** |  | **2.819** | **2.109** | **76,16** |
| 1. Jumlah Kapasitas Lembaga/Organisasi Masyarakat yang dapat diberdayakan
 | Lembaga | 594 (3.838), 295 Org. | 565 (3.635), 282 Org. | 95,12 |
|  |  |  |  |  |
| 1. Persentase swadaya Masyarakat
 | % | 33 Lbg/Tim | 27 (3 Tim/Org). | 81,81 |
| 1. Jumlah Kapasitas Lembaga dan Ekonomi Kelurahan
 | Lembaga | 12 Pst/Tim, 365 BBGRM | 5. Pst (15 Org)- BBGM | 41,67- |
| **Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat** |  | **594 Lbg, 4133 Org.** | **565 Lbg. 3.917 Org.** | **95,12** |

Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, tetap target dapat tercapai, adapun pada Tahun 2019, Urusan Sosial capaian target Indikator rata-rata = 87,35 %(tabel di atas), dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat capaian target Indikator rata-rata = 81,00 % ;

Sasaran tersebut di capai melalui program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan alokasi Anggaran dari APBD II sebesar Rp. 18,685,267,564,00 Terealisasi Rp. 17,260,609,618,00 (92,38%) melaui kegiatan :

1. Verifikasi dan Validasi data PMKS target/Realisasi 12 Kecamatan (DTKS.37.428 tervirifikasi 55.669 KPM);
2. Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Wilayah Perkotaan - Unit/rumah
3. Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Wilayah Pesisir dan Perbatasan 55 Unit/rumah;
4. Kesiapsiagaan dan tanggap darurat Korban Bencana 840 Jiwa/paket
5. Penyuluhan Sosial – Orang
6. Bantuan Sosial Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial - Lembaga
7. Bimbingan terhadap Orsos 25 lembaga/Org
8. Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) 112 Orang, (19.658KPM);
9. Bantuan pemulangan orang terlantar dan pemulangan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, 51 Orang;
10. Pemakaman bagi Tunawan (Mr/Mrs. X), 17 Orang;
11. Bantuan Sosial bagi Anak dan lanjut usia, 450 Orang;
12. Bimbingan dan keterampilan bagi PMKS, 40 Orang;
13. Pengendalian dan pengawasan bagi PMKS, 333 Orang;
14. Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas, 174 Orang;
15. Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai, 12 Kecamatan ( - RTS)
16. Pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat, 565 Lembaga (3.917 Org);
17. Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi masyarakat, 27 psrt.
18. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kota Batam, 5 Pst./Orang (15 Org)
19. Pendampingan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). ( 250 Orang).

Kegiatan yang ditunjang dari Anggaran APBD I / APBN dengan alokasi Anggaran sekitar **Rp**. **96,719,440,000,00** dalam beberapa program dan kegiatan yaitu, :

1. Program Keluarga Harapan (PKH), 21,378 KPM : 67,148,075,000,00

 Dana Dekonsentrasi untuk Operasional PKH, : 164,765,000,00

1. Pemberdayaan Fakir Miskin melalui
2. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) target

sebanyak 32,493 KPM. Terealisasi 21.843 KPM. : 28,832,760,000,00

1. Pendamping BPNT Kortek dan TKSK. : 92,240,000,00
2. Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas 40 Orang : 144,000,000,00
3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Al-Fateh 6 Orang : 21,600,000,00
4. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). : 316,000,000,00

**Jumlah ............. :96,719,440,000,00**

**Peningkatan Kualitas Hidup Sosial Kemasyarakatan;**

1. Menurunya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jumlah BDT yang terverifikasi : |  | Jumlah PMKS yang tertangani : |
| 37.428= x 100 % = 149 *%* 55.669 |  | 67= x 100 % = 93,05 *%* 72  |

1. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi

dalam Penanganan PMKS.;

Sasaran yang tertangani 25

Jumlah PMKS = x 100 % = 100 ***%***

 25

1. Jumlah PMKS yang mendapatkan Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial;

Sasaran yang tertangani 1.020

Jumlah PMKS = x 100 % = 60,10 ***%***

 1.697

1. Persentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi;

Sasaran yang tertangani 997

Jumlah PMKS = x 100 % = 97,26 ***%***

 1.025

1. Jumlah Kapasitas Lembaga/Organisasi Masyarakat yang dapat diberdayakan;

Sasaran yang tertangani 565

Jumlah Org. Kelemb. Masy. = x 100 % = 81,41 ***%***

 694

1. Prosentase swadaya Masyarakat;;

Sasaran yang tertangani 27

Jumlah swadaya Masy. = x 100 % = 81,81 ***%***

 33

1. Jumlah Kapasitas Lembaga dan Ekonomi Kelurahan, ;

Sasaran yang tertangani 5

Jumlah Org. P. Masy. = x 100 % = 41,67 ***%***

 12

Permasalahan, masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak mengenakan bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sehingga upaya penanganan nya juga harus dilakukan secara senergi dan bersama-sama dengan berbagai pihak, dan berkesinambungan sehingga akhirnya dapat membantu dan mengurangi sifat ketergantungan dengan harapan dapat menolong dirinya sendiri.

**3.4. Aspek Keuangan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **KEGIATAN** | **Target****(Rp)** | **Realisasi****(Rp)** | **(%)** |
| **I** | **BELANJA TIDAK LANGSUNG**  |
| 1. | Belanja Pegawai  | 8,102,579,062,65 | 7,893,934,428,00 | 97,42 |
| 2. | Belanja Barang dan jasa | 16,831,143,964,00 | 15,489,853,798,00 | 92,03 |
| 3. | Belanja Hibah | 1,495,200,000,00 | 1,416,378,320,0 | 94,73 |
| 4. | Belanja Modal Peralatan Dan Mesin | 112,464,000,00 | 110,422,500,00 | 98,18 |
| 5. | Belanja Modal Gedung Dan Bangunan | 246,459,600,00 | 243,955,000,00 | 98,98 |
|  | Jumlah Belanja Langsung | **26,787,846,626,65** | **25,154,544,046,00** | **93,90** |
|  |  |  |  |
| KEGIATAN | **Target****(Rp)** | **Realisasi****(Rp)** | **(%)** |
| II | **BELANJA LANGSUNG**  |
| **Program Pelayanan Administrasi perkantoran** |  |  |
| 1. | Jasa / gaji THL | 613,800,000,00 | 610,650,000,00 | 99,49 |
|  | Jasa/upah buruh petugas pemeliharaan Taman, kebersihan, tenaga adm, keamanan, pengemudi dan asuransi kes. |  |  |  |
| 2. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 70,547,000,00 | 70,278,100,00 | 99,62 |
| 3. | Alat listrik dan alat elektronik pakai habis | 2,420,400,00 | 2,384,500,00 | 98,52 |
| 4. | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 2,034,400,00 | 2,034,400,00 | 100 |
| 5. | Bahan bakar minyak dan Gas | 119,155,200,00 | 119,155,000,00 | 100 |
| 6. | Belanja Rekening telpon | 2,400,000,00 | 2,099,218,00 | 87,46 |
| 7. | Belanja Rekening Air | 132,000,000,00 | 107,506,775,00 | 81,44 |
| 8. | Belanja Rekening Listrik | 180,000,000,00 | 148,650,780,00 | 82,58 |
| 9. | Penyediaan Barang Cetakan & Penjilidan | 12,449,800 | 12,449,800 | 100 |
| 10. | Penggandaan (foto copy) dokumen | 14,582,100 | 8,792,000 |  |
| 11. | Konsumsi | 2,700,000 | 2,700,000 | 100 |
| 12. | Perjalanan Dinas dalam Daerah (Laut) | 129,210,000,00 | 76,075,000,00 | 58,87 |
| 13. | Perjalanan Dinas Luar Daerah  | 685,790,000,00 | 258,561,471,00 | 37,70 |
| 14. | Belanja Pajak, Retribusi dan iuran lainya | 15,124,650 | 6,372,000 | 42,13 |
| **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |  |  |
| 1. | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | - | - |  |
| 2. | Belanja Bahan minyak dan Gas (oli) | - | - |  |
| 3. | Belanja jasa kantor (pengiriman kendaraan) | 745,520,000,00- | 597,953,021,00- | 98,70 |
| 4. | Belanja Pemeliharaan Taman | - | - |  |
| 5. | Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor | 43,700,000,00 | 43,700,000,00 | 100 |
| 6. | Belanja penggantian suku cadang kendaraan bermotor | 44,247,400,00 | 44,247,400 | 100 |
| 7. | Belanja modal kontruksi/pembelian gedung dan bangunan lainnya | 246,459,600,00 | 243,955,000,00 | 98,98 |
| **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** |  |  |
| 1. | Belanja Perjalanan dinas | - | - | - |
| 2. | Belanja Konstribusi Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | - | - | - |
| **Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** |  |  |
| 1. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | - | - |
| 2. | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | - | - | - |
| 4. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan | - | - | - |
| 5 | Monitoring dan Evaluasi | - | - | - |
|  | Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya  | 5,646,126,600,00 | 5,029,634,268,00 | 93,37 |
|  | Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat | 10,486,531,000,00 | 10,234,682,665,00 | 97,60 |
| *Jumlah Belanja Langsung* | 16,132,657,600 | 15,491,948,768,00 | 96,03 |
| *Jumlah SELURUHNYA.....* | **26,787,846,626.65** | **25,154,544,046.00** | **93,90** |

BAB IV

PENUTUP

* 1. **Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja**

**P**

ada Tahun 2019 berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja sasaran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Secara keseluruhan dari 2 sasaran Strategis berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021 dan menunjukkan keberhasilan pencapaian sasaran capaian kinerja “*Cukup* *Berhasil* ”, Sasaran “Peningkatan Kualitas Hidup Sosial Kemasyarakatan”

dengan Pencapaian indikator jika di rata-rata 84,17%.

* 1. ***Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja serta Langkah Antisipatif***

**D**

alam Tahun 2019 terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam meliputi :

1. Tingginya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Wilayah Kota Batam, disebabkan tumbuh dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor (Ekonomi, Budaya, Politik, Etnis, Agama, Penyimpangan perilaku, Hukum, industrialisasi dan urbanisasi ). Adapun luasnya wilayah Kota Batam yang merupakan daerah kepulauan terdiri dari 12 kecamatan dan 64 Kelurahan, di tahun 2019 baru di lakukan verifikasi data Masyarakat miskin yang berasal dari Basis Data Terpadu di Tahun 2019 menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 55,669 KPM dari sebelumnya 37.428 KPM, artinya ada peningkatan dari jumlah data yang ada kemudian dilakukan Validasi, hal ini kedepan akan dipergunakan sebagai acuan Basis Data kemiskinan di Kota Batam sehingga dapat mempermudah dalam penentuan Program pengentasan dan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejajhteraan Sosial, (kemiskinan).
2. Masih perlu di optimalkan kembali peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam membantu penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, sehingga dapat dan mampu memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial di lingkungannya dengan baik.
3. Belum adanya keseimbangan antara populasi PMKS yang harus ditangani dan dengan ketersediaan dana, hal ini mengakibatkan upaya penanganan tidak dapat dilaksanakan secara serempak, sementara keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang bermobilitas tinggi, belum dapat bersinergi dengan daerah lain.
4. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia dalam pemahaman dan pengetahuan mengenai permasalahan Kesejahteraan Sosial yang dimiliki baik di kalangan Legislatif, aparatur pemerintahan maupun masyarakat khususnya kalangan yang berpotensi sebagai sumber kesejahteraan sosial mitra kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.
5. Ketidak tercapainya program-program APBD II dikarenakan ada beberapa kegiatan Dalam melaksanakan kegiatan atau penananagan jika ada kejadian terlebih dahulu contoh ; Kejadian bencana Alam/Sosial, Penanganan Orang Terlantar dan Penanganan Pemakaman bagi Tunawan (Mr/Mrs meninggal terlantar), sementara untuk Program Nasional melalui Program Keluarga harapan, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota batam cukup berjalan lancer, meskipun ada beberapa kendala di lapangan, dapat di koordinasikan Lintas Dinas / Lembaga sebagai pelaksana Program di Daerah.
6. Peningkatan baik kuantitas maupun kualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / masyarakat tidak mampu di Kota Batam dari hasil pengamatan sebenarnya ada gejala mentalitas sebagian dari masyarakat tersebut yang menganalogikan bahwa semua warga negara berhak untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah, sehingga di butuhkan Bimbingan ataupun Penyuluhan terhadap Masyarakat agar dapat memahami.

**Langkah Antisipatif :** Dalam memecahkan kendala hambatan diatas Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam menentukan skala prioritas baik lokasi maupun jumlah besaran anggaran yang digunakan pada setiap kegiatan dan memberikan bantuan penunjangan dalam rangka meningkatkan kemampuan, tenaga/Sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang terdapat pada Sumber Kesejahteraan Sosial guna meningkatkan pelayanan Kesejahteraan Sosial pada masyarakat, disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

***4.3. Strategi Pemecahan Masalah***

Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam telah menetapkan strategi pemecahan masalah pencapaian sasaran, program dan kegiatan untuk Tahun 2019 melalui strategi sbb :

1. Peningkatan mutu pelayanan sosial kepada masyarakat khususnya kalangan masyarakat yang merupakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Wilayah Kota Batam.
2. Menggali anggaran selain dari APBD II juga dari APBD I, APBN dan Dari Dunia Usaha melalui Dana CSR walaupun baru beberapa Perusahaan yang telah melakukan kerjasama dalam peningkatan SDM bagi PMKS, sementara sebagian besar dari Perusahaan mempergunakan dana CSR nya bentuknya masih pada acara-acara serimoni (Ulang Tahun Perusahaan).
3. Menjalin Kerjasama dengan Dunia usaha, dengan harapan dapat menyalurkan SDM bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah diberikan Bimbingan dan Keterampilan setelah selesai langsung dapat disalurkan dan bekerja.
4. Meningkatkan Pemberdayaan terhadap lembaga-lembaga yang ada di tingkat Kelurahan sehingga dapat meningkatkan kemampuan, kemandirian dan partisipasi bagi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Batam.

Batam, Januari 2020.

**KEPALA,**

**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM**

**H A S Y I M A H, MM.**

NIP. 19630607 198606 2 003

LAMPIRAN

LKjP 2019

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM

TABEL : VI.1

INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, YANG MENGACU

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (RPJMD 2016 – 2021)).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR** | **KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD** | **TARGET KINERJA SASARAN****PADA TAHUN KE -** | **KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Menurunya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 10 % .36.103. | 10 % .36.103(3.611) | 15 %39.903 | 20 %39.903. | 25 %39.903 | 30 %39.903 | 40 %39.903 |
| Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS. | 30 %294 | 60 %156 | 60 %250 | 65 %265 | 65 %279 | 70 %294 | 75 %294 |
| Jumlah PMKS yang mendapatkan Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial. | 36.1031,948 | 36.1032,103 | 36.1032,623 | 39.9032,773 | 36.1032,500 | 39.9032,400 | 39.9032,800 |
| Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang dapat di Rehabilitasi; | 25%8.197 | 30 %8.197(1,390) | 35 %8.200 | 40 %8.200 | 45 %8.225 | 50 %8.225 | 55 %8.250 |
| Jumlah Kapasitas Lembaga/Organisasi Masyarakat yang dapat diberdayakan | 519, | 519 | 535 | 545 | 555 | 565 | 600, |
| Persentase swadaya Masyarakat | 30 % (2000) | 35 %(1000)300,7 | 40 %(1000) | 45%(1000) | 50%(1000) | 50%(1000) | 50%(1000) |
| Jumlah Kapasitas Lembaga dan Ekonomi Kelurahan | 50 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 | 750 |

TABEL : VI.1

INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN (RPJMD 2016 – 2021).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **T U J U A N** |  |  | **KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD** | **TARGET KINERJA SASARAN** **PADA TAHUN KE -** | **KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD** |
| **S A S A R A N** | **INDIKATOR KINERJA PRORGAM (OUTCOME)** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | Peningkatan Kualitas Hidup Sosial Kemasyarakatan | Menurunya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS ) | 10 % .36.103. | 10 % .36.1033.611 | 15 %39.903 | 20 %39.903. | 25 %39.903 | 30 %39.903 | 40 %39.903 |
| Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS. | 30 %294 | 60 %156 | 60 %250 | 65 %265 | 65 %279 | 70 %294 | 75 %294 |
| Jumlah PMKS yang mendapatkan Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial | 36.1031,948 | 36.1032,103 | 36.1032,623 | 39.9032,773 | 36.1032,500 | 39.9032,400 | 39.9032,800 |
| Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial; | 25%8.197 | 30 % 8.1971.390 | 35 %8.200 | 40 %8.200 | 45 %8.225 | 50 %8.225 | 55 %8.250 |
| Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | Peningkatan Kualitas Hidup Sosial Kemasyarakatan | Jumlah Kapasitas Lembaga/Organisasi Masyarakat yang dapat diberdayakan | 519 | 519 | 535 | 545 | 555 | 565 | 600 |
| Prosentase swadaya Masyarakat | 30 %2000 | 35 %1000300,7 | 40 %1000 | 45%1000 | 50%1000 | 50%1000 | 50%1000 |
| Jumlah Kapasitas Lembaga dan Ekonomi Kelurahan | 50 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 | 750 |